

## Kemandirian Ekonomi Pesantren Ditinjau Dari Aset dan Operasionalnya

Singgih Muheramtohad<sup>1)</sup>, Septiana Na'afi<sup>2)</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

\*Email korespondensi: [singgih\\_muheramtohad@walisongo.ac.id](mailto:singgih_muheramtohad@walisongo.ac.id)

### Abstract

*Minister of Religious Affairs, Yaqut Chalil Qaumas in 16<sup>th</sup> of December 2021 Stated that he would release the Pesantren Economic Independence Program. Pesantren have make the breakthrough with maximilixing their economic potency. The model that will be purposed is the giving investment capital with associate to BUMN and make them as 'foster parents' for pesantren in developing its business. This program can't be assessed how it will work. But the term of Independency Pesantren in Economy, must be explained in detail how the independency of pesantren so far. This write will explain two sides, they are the independency of its asset and independency of its operational. Is it true that the these institutions depend on other parties? The discussion in this write use description and analysis methods. And the result of this discussion are the pesantren have the culture power that take root in the middle of society. And the aid and grant that received from others, including alumni, not considered the aid from others, but those the potency of pesantren.*

**Keywords :** Pesantren, Economic Independence Program, Islamic Economic

**Saran sitasi:** Muheramtohad, S., Na'afi, S. (2022). Kemandirian Ekonomi Pesantren Ditinjau Dari Aset dan Operasionalnya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1570-1576. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4880>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4880>

### 1. PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan respon dari gagasan yang dicanangkan oleh Kementerian Agama baru-baru ini. Di berbagai media massa, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menginisiasi program Kemandirian Ekonomi Pesantren. Dalam tahap rintisan, akan dikembangkan 105 model percontohan, kemudian di fase selanjutnya akan dikembangkan menjadi 5.000 pesantren. Pesantren ini akan diberikan modal usaha dan akan bekerjasama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Peran BUMN diharapkan akan menjadi 'bapak angkat' pada lembaga-lembaga pesantren, dalam mengembangkan modal.(Permana, 2021)

Menurut tataran teoritis gagasan ini sangat baik. Karena pesantren selama ini kurang maksimal dan optimal dalam pengembangan dunia usaha. Padahal pesantren memiliki potensi yang sangat besar untuk digerakkan. Mereka memiliki jutaan sumber daya manusia, yang selama ini hanya fokus pada urusan 'fiqh' semata. Menurut pemikiran Gus Yaqut, urusan pendidikan dan da'wah merupakan 'kolam kecil', sedangkan urusan ekonomi adalah 'kolam

besar'(Permana, 2021). Mungkin akan banyak pihak yang mengkritisi istilah demikian, tetapi di balik gagasan tersebut tersimpan cita besar, yang ingin merombak keadaan lembaga pendidikan pesantren, dalam bersaing di era global.

Gus Yaqut memiliki bayangan positif terhadap agenda yang dicanangkan. Ia berharap banyak stakeholders yang masuk ke pesantren, melakukan pemberdayaan di dalamnya. Di sini ia mendudukkan Pesantren bukan hanya sebagai 'tempat mencari ilmu', tetapi juga tempat para pihak yang hendak diberdayakan, terkait manajemen usaha. Dengan kualitas sumberdaya manusia yang mumpuni dan berlimpah, maka pesantren akan memiliki kemampuan /skill. Maka, perlu diberdayakan dengan pelatihan-pelatihan, dari modal, pendampingan, hingga pemasaran (Permana, 2021). Dengan menguasai hal-hal demikian, maka akan mendongkrak ekonomi pesantren.

Terdongkraknya ekonomi pesantren, maka akan membuat kemajuan. Baik itu kemajuan yang dirasakan oleh pesantren. Seperti bertambahnya berbagai fasilitas yang dimiliki oleh pesantren,

berkurangnya pembayaran *syahriyah*, mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar pesantren. Semuanya itu bisa terwujud, jika ada pertambahan jumlah *income* yang sifatnya tetap dalam pesantren.

Gus Yaqut sendiri merupakan orang *ndalem* pesantren. Beliau dibesarkan dalam budaya pesantren sejak masa belia, sehingga ia mengetahui bagaimana “jeroannya” pesantren tersebut. Meskipun demikian, tulisan ini hendak mendeskripsikan permasalahan kemandirian ekonomi di Pesantren secara obyektif, dengan mengkaji bagaimana model kemandirian ekonomi pesantren selama ini dikembangkan, bagaimana fase-fase perkembangan asset pesantren, darimana sumberdana pengelolaan pesantren, serta bagaimana kerjasama antara pemerintah dan pesantren dalam menunjang kemandiriannya ini dilakukan pada masa sebelumnya.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Dimana sumber primer berasal dari studi kepustakaan, baik dalam bentuk buku, jurnal, atau sumber lainnya, baik diambil dari kantor media, atau dari internet. Sedangkan metode penelitian menggunakan deskripsi dan analisa. Deskripsi merupakan penggambaran atau penjabaran dari obyek dengan menggunakan kata-kata tertulis, bersifat jelas, sehingga mudah dipahami arahnya, analisis yang digunakan dengan menguraikan unsur-unsur yang ada dalam obyek kajian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Kemandirian Pesantren

Kemandirian Pesantren terdiri dari dua kata, yaitu Mandiri dan Pesantren. Mandiri adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa tergantung dengan pihak lain (Gischa, 2020). sedangkan pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan tempat para santri di Nusantara menuntut pengetahuan agama, yang dimulai sejak beberapa abad silam. Sehingga jika dua kata ini digabungkan akan menjadi kemampuan lembaga pendidikan Pesantren dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa tergantung dari pihak luar.

Apakah ‘pesantren’ tidak mandiri? Sebenarnya pesantren sejak awal mulanya sudah mandiri. Mereka berkembang sesuai dengan kebutuhannya, dan

dilaksanakan secara gotong royong. Semua pihak yang terlibat dalam pesantren tidak hanya kiai, ustadz dan santri. Melainkan juga masyarakat sekitar, wali santri, alumni dan sebagainya. semuanya itu diikat secara *primordial* sebagai keluarga besar pesantren. Alumni dan masyarakat sekitar, bukan lah ‘orang luar’. Bahkan sebelum Republik ini berdiri, pesantren sudah berkembang dan memiliki ribuan santri, tanpa menggantungkan bantuan dari pemerintah.

Kemandirian pesantren tercermin dari perkembangan asset yang dimiliki pesantren, sumber pendapatan pesantren, dan pemasukan dari sumber lain seperti koperasi, wakaf dan hibah, serta kerjasama pesantren dengan pemerintah dan pihak luar.

### 3.2. Perkembangan Aset Pesantren sesuai Fasenyanya

Pesantren merupakan hal yang spesifik di Indonesia. Orang yang belajar di pesantren, namanya santri, bukan murid atau siswa. Santri diambil bukan dari kata serapan dari bahasa arab, karena bahasa arab yang digunakan untuk menyebut murid/siswa adalah *Thulab*. Istilah pesantren merupakan khas Nusantara, yang berarti ‘tempatnya para santri’(Yunus, 2015). Karena khas, maka pesantren tidak memiliki padanan dengan kata lain dalam bahasa asing. Selama ini penerjemahan kata ‘pesantren’ dialihbahasakan ke Inggris menjadi ‘*Islamic Boarding School*’, Boarding School sendiri artinya adalah ‘Sekolah Berasrama’(Syafei, 2017). Walaupun terjemahan ini tidak bisa diterima, jika melihat *sosio historis* pesantren.

Sosio-historis pendirian pesantren *salaf*, berbeda dengan jenis pesantren *khalaf* (pesantren modern). Menurut qomar, perbedaannya terletak pada materi dan metode pengajarnya. Materinya berupa kajian terhadap kitab karya ulama salaf, dengan metode *halaqah*, baik dengan *bandhongan* ataupun *sorogan*. Sedangkan pesantren *khalaf*, berdasarkan model Klasikal(Qomar, 2000). Dalam model halaqah, para santri hanya membutuhkan aula relative besar, yang juga bisa digunakan untuk mushola/langgar. Sedangkan dalam pesantren *khalaf*, harus membutuhkan gedung sekolah, yang secara biaya jauh lebih tinggi.

Win Ushuluddin mengemukakan perkembangan Pondok Pesantren berdasarkan asetnya. Pada Pola I, pesantren hanya terdiri dari masjid dan rumah kiai, kemudian pada pola II, baru berdiri Pondok, sehingga memiliki tiga unsur (rumah kiai, masjid dan pondok), Pola III, bertambah jadi satu, yaitu madrasah,

sehingga ada 4 unsur (Rumah Kiai, masjid/aula, pondok dan Madrasah), kemudian pada Pola berikutnya, terdapat lembaga-lembaga tempat mengasah ketrampilan, baru kemudian bertambah unsur pesantrennya, dengan adanya perguruan tinggi, dan balai pertemuan (Ushuluddin, 2002). Tetapi, tidak semua pesantren berkembang dari titik awal mula seperti ini. Tetapi pada banyak kasus, pesantren mengalami perkembangan, seiring dengan perkembangan aset wakafnya.

Pendirian pesantren salaf memiliki akar sejarah dan terkait dengan perkembangan aset. Dalam fase pertama pendirian pesantren salaf, kiai hanya 'bermodal' bangunan rumah pribadi, serta aula yang berada di dekat kediamannya. Ia tidak memiliki pondokan, sehingga masyarakat belajar langsung padanya, di aula/langgar. Di sekitar pesantren tebuireng, juga memiliki model pesantren yang sederhana, dimana kiai hanya memiliki tempat tinggal pribadi dengan aulanya. Dimana masyarakat dan orang di luar kampung menghadiri pengajian kitab yang rutin ia lakukan. Model yang sama juga menjadi cikal bakal Pesantren Al Huda di Boyolali. Pada mulanya, KH Habib Ihsanudin hanya melakukan pengajian yang dirintisnya pada tahun 1960an, karena permintaan masyarakat dan jama'ah, maka baru dibangun pondokan. (Solikhin, 2011)

Pola berikutnya, pesantren hanya memiliki tiga aset, yaitu *ndalem kiai*, langgar/aula, dan pondokan. Pesantren al Qur'ani di Mangkuyudan Surakarta memiliki tiga hal ini. Pada fase ini, biasanya para *keluarga ndalem* mulai memikirkan untuk pemisahan antara aset pribadi dengan aset wakaf. Karena status hukum pesantren adalah wakaf ahli. Yaitu wakaf yang kepengurusannya, diserahkan kepada *nazhir* dalam dipimpin dari satu anggota keluarga yang cakap secara turun temurun. *Omah ndalem kiai*, merupakan aset pribadi yang bisa diwariskan ke para putranya, sedangkan pesantren tidak dapat diwariskan. Para putra (gus) hanya bisa mewarisi peran yang diambil dari ayahnya, yaitu sebagai pengasuh. (Kusdiana, 2014).

Menurut Martin Van Bruinessen para kiai memiliki sumber penghasilan pribadi. Biasanya ia memiliki lahan pertanian yang dikerjakan oleh santrinya, ataupun berasal dari *hibah* dari sumber luar, misalnya dari para mantan santrinya (alumni), pada umumnya kiai tradisional tidak mengambil keuntungan dari *margin* pembayaran syahriyah (Bruinessen, 1994). Biasanya besaran pembayaran

*syahriyah*, habis untuk biaya listrik dan air. Para ustadz dan *badal* banyak yang mengajar tanpa digaji, sebagai bentuk pengabdian. Karena dunia pesantren adalah 'dunia pengabdian', dan sangat berbeda dengan dunia bisnis, dalam dunia kerja, tiap keringat ataupun waktu harus diukur lewat angka nominal (uang) hal seperti ini tidak terjadi di Pesantren.

Perlu dipahami bahwa pada perintisan pesantren, kepemilikan aset atas masjid bukan lah syarat mutlak dalam pendirian sebuah pesantren. Karena dalam madzhab Syafi'i hanya diperbolehkan satu masjid dalam satu *qoryah*. Misalnya di Kajen Pati, dibedakan antara masjid Pesantren dan masjid Jami', memiliki *mushalla* sangat besar, tetapi tidak bisa diperuntukkan untuk shalat jum'at (Abidin, 2020). Sedangkan pesantren yang menggunakan metode *halaqah* (sorogan dan bandongan) cukup menggunakan aula yang bisa juga difungsikan sebagai tempat shalat (mushalla/langgar).

Pada Pola berikutnya berikutnya adalah pendirian lembaga sekolah. Lembaga sekolah yang berdiri di bawah yayasan pesantren, mulai 'menjamur' sesudah dikenalkan pendidikan formal klasikal. Pendidikan formal klasikal dengan ciri pengajaran berjenjang dari kelas I sampai kelas III, kemudian meningkat ke jenjang Aliyah (SMA). Sehingga sesudah tahun 1960an, banyak pesantren yang mendirikan gedung sekolah, sembari mempertahankan model lama (salafiyah), sehingga pesantren jenis ini dikenal dengan nama Pesantren campuran (Qomar, 2000). Sehingga, penambahan aset pesantren, dalam hal ini gedung sekolah, sangat terkait dengan kebutuhan masanya.

Pada pola berikutnya adalah pendirian berbagai lembaga di bawahnya. Seperti pendirian Universitas (kampus), perpustakaan, serta berbagai fasilitas lainnya, seperti Fasilitas Olahraga, Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren), Klinik, dan seterusnya. Ini merupakan pola perkembangan akhir. Yaitu dari Pesantren dalam bentuk yang sangat sederhana bisa menjadi pesantren besar, seiring dengan besarnya aset yang dimilikinya (Ushuluddin, 2002).

### **3.3. Sumber Pendapatan Pesantren**

Semua kegiatan membutuhkan dana, yang digunakan untuk operasional sehari-hari. Begitu juga dengan pesantren, yang memiliki banyak agenda kegiatan harian, pekanan atau bulanan. Mereka membutuhkan listrik, air, tempat tinggal yang layak, gaji untuk para pengajar, dan sebagainya. sehingga

perlu memikirkan dari mana sumber pendapatan pesantren.

Pada dasarnya pesantren bukan lah lembaga profit melainkan yayasan. Ini perlu dipahami, agar tujuan dari sebuah system organisasi itu dapat dipahami secara mendasar. Karena mengarahkan pesantren menjadi sebuah mesin profit, itu jelas bertentangan dengan tujuan pendirian pesantren. Karena pesantren adalah tempat orang-orang menjadi santri yang sedang menuntut ilmu. Kriteria kesuksesan sebuah pesantren tidak terletak pada berapa omzet yang dihasilkan, melainkan dari seberapa besar manfaat pesantren tersebut bagi dakwah dan tarbiyah di masyarakat. Kiai sendiri diidentikkan dengan seseorang yang menguasai ilmu agama, yang sangat dekat dengan masyarakat, dan dipercaya oleh masyarakat (Qomar, 2000).

Santri ketika menuntut ilmu, yang mereka butuhkan adalah kebutuhan primer terlebih dahulu. Yaitu Papan, Sandang, dan Pangan. Pada kebutuhan Pangan dan Sandang, disediakan dari rumah, dari uang yang dibawa oleh santri, atau mendapatkan kiriman dari orangtua ataupun wali mereka. Sedangkan 'papan' disediakan oleh Pesantren. Besaran uang pungutan untuk pondok pesantren ini berbeda-beda antara satu pondok dengan lainnya. Pada pesantren tradisional, biasanya menarik iuran secukupnya, dan dikoordinir oleh Lurah Pondok. Yang bertanggungjawab penuh dalam segala hal, termasuk pengelolaan keuangan pondok. Karena Lurah Pondok menjadi wakil Pimpinan Pesantren, dalam mengatur kehidupan pondok sehari-hari (Syafei, 2017).

Pesantren Salaf pada umumnya tidak memungut biaya dalam kegiatan *halaqah*. Misalnya ketika sorogan atau bandhongan. Bandhongan adalah pembacaan kitab klasik yang dibacakan oleh Kiai, sedangkan para santrinya menyimak dan *mengasah-ngasahi*. Yaitu memberikan tulisan *pagon* berbahasa Jawa tepat dibawah tulisan berbahasa Arab yang telah diartikan oleh kiainya. Sedangkan sorogan merupakan setoran, baik setoran membaca *matan kitab*, ataupun *juz 'Amma*. Aktivitas semacam ini dilakukan oleh beberapa ustadz yang membantu kiai, tergantung dari banyak sedikitnya santri.

Operasional Diniyah dan Sekolah memerlukan bayaran. Karena pesantren banyak mengambil pengajar dari luar untuk dipekerjakan di Pesantren. Biasanya, sekolah formal yang didirikan oleh pesantren salaf, mempunyai otonomi (terpisah) dalam

hal pengelolaan keuangan maupun manajemennya, dibandingkan pesantren modern seperti Gontor. Karena di sekolah yang didirikan pesantren salaf, orang luar dapat bersekolah di sekolah yang didirikannya tersebut. Berbeda dengan model madrasah yang dikembangkan oleh Pesantren Modern, dimana hanya santri pesantren lah yang diperbolehkan untuk bersekolah di tempat tersebut. Seperti Pesantren As Salam di Kota Surakarta. Di lembaga tersebut, manajemen sekolah maupun pondokan, di bawah langsung direktur pesantren (Qomar, 2000). Model seperti ini hampir sama dengan model sekolah berasrama di barat.

Biaya keseluruhan pesantren selama ini mengandalkan *syahriyah* atau Pembayaran bulanan. Dalam syahriyah, mereka ditarik iuran, asrama dan diniyah. Sedangkan untuk SPP Sekolah dibayarkan di Sekolah, bukan ke Lurah Pondok. Sedangkan di Pesantren Modern, semuanya '*All in*', bahkan untuk konsumsi sehari-hari (makan dan minum). Besar syahriyah di lingkungan Pesantren Modern rata-rata berkisar antara 700 sampai 1,5 juta per bulan, sebagai kalkulasi dari semua jenis pembayaran. Asrama + Makan + SPP + Kegiatan + Biaya Ujian dan seterusnya.

Perkembangan sebagian Pesantren banyak didanai oleh Biaya Pembangunan. Biaya Pembangunan merupakan dana yang dibayarkan ketika seorang siswa atau santri mendaftarkan diri menjadi santri. Tetapi hal ini juga tergantung dari kebijakan pesantren terkait, apakah menerapkan model 'Biaya Pembangunan' atau tidak. Keseluruhan dari dana pembangunan ini dikumpulkan, kemudian dibelikan lahan dan bangunan, baik berdekatan atau berjauhan dengan lokasi awal pesantren. Meski dalam sebagian sejarah pesantren, pengembangan sarana fisik dilakukan oleh Kiai pengasuh pesantren itu sendiri, seperti pembangunan Pesantren Tebuireng, sebagian dana pembangunannya diambil dari harta milik KH Hasyim Asy'ari sendiri (Nazar, 2020).

Cara seperti ini tidak lah dilakukan oleh sebagian pesantren yang konsisten dengan model salafnya. Mereka hanya menyelenggarakan pendidikan dengan mengkaji kitab, para santri hanya dibebani biaya pondokan. Sedangkan untuk urusan makan dan minum biarkan urusan mereka. Bahkan untuk memilih sekolah di luar, mereka dibebaskan, sekalipun itu di Pendidikan Umum. Sehingga secara operasional, sebenarnya mereka dibiayai oleh mereka sendiri. artinya sudah terjadi kemandirian Pesantren di bidang

pembiayaan. Karena biaya operasional diambilkan dari pihak mereka sendiri (yaitu para santri).

### **3.4. Pemasukan dari Sumber Lain**

#### **a. Koperasi Pesantren (Kopontren)**

Koperasi pesantren merupakan badan usaha yang paling banyak dikembangkan di pesantren. Semua pesantren yang memiliki madrasah/sekolah, hampir bisa dipastikan memiliki koperasi. Karena koperasi menyediakan berbagai keperluan santri. Dari peralatan mandi peralatan makan, buku pelajaran sampai kitab. Sehingga belanja santri tidak 'keluar' melainkan masuk ke internal, dan menjadi profit lembaga pesantren.

Pesantren Ta'mirul Islam sendiri mengembangkan BUMP (Badan Usaha Milik Pesantren). Dalam BUMP, mereka mengelola berbagai jenis usaha, tidak hanya melayani kedalaman melainkan juga keluar. Seperti pelayanan fotocopy, penyewaan Minibus, kantin, dan sebagainya (Tamami, 2018). sedangkan di sebelah Barat pesantren ini, kurang lebih 200 meter, terdapat Pesantren Al Muayyad yang juga mengembangkan Koperasi, yang tidak hanya melayani kebutuhan santri semata, melainkan juga masyarakat sekitar. Sehingga penghasilan yang diperoleh Koperasi bisa lebih maksimal dan dapat digunakan untuk keperluan biaya operasional pesantren.

Pesantren besar seperti Gontor juga mengembangkan usaha sejenis. Bahkan, Pesantren ini memiliki usaha yang menyerupai mall di tengah kota Ponorogo. Di tengah Pesantren Gontor I juga terdapat percetakan kitab, yang digunakan untuk bahan pelajaran. Berbagai pesantren alumni yang tumbuh subur, memesan buku pelajaran dari percetakan ini.

Usaha yang dimiliki oleh pesantren pada umumnya berkembang dan maju dengan melibatkan tenaga dari luar. Beberapa koperasi pesantren yang telah maju, seperti Gontor ataupun al Muayyad Solo melibatkan tenaga luar, untuk mengoperasikan usahanya. Dalam hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Pertanian terhadap berbagai lembaga LM3 (kebanyakan dari pesantren), usaha agrobisnis pesantren yang maju biasanya bekerjasama dengan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Karena tidak semua SDM untuk mengembangkan bisnis *available* di

pesantren. Mereka juga fokus pada aktivitas belajar mengajar, sehingga kurang memiliki waktu untuk merintis usaha.

#### **b. Wakaf dan Hibah**

Pada umumnya pesantren salaf berkembang mulai dari titik terkecil. Yaitu dimulai dari kiai perintis. Kemudian mendapatkan sokongan, salah satunya dengan memberikan asset tak bergerak yang berupa lahan. Sebagiannya lagi menyumbang dalam bentuk bangunan. Jika tidak ada wakaf, maka pesantren sulit untuk berkembang.

Terdapat pesantren yang mengembangkan lembaga ZISWAF (Zakat Infaq, Shodaqoh dan wakaf), tetapi terdapat pula yang tidak. Biasanya seseorang mendatangi kiai kemudian memberikan sebagian dari apa yang dimilikinya. Di Pesantren Luqmaniyah Yogyakarta, seorang yang bernama Pak Luqman, memberikan tanah dan bangunan yang dimilikinya untuk dikelola menjadi pesantren, kemudian dinamakan dengan Luqmaniyah, kepada Keluarga Pesantren Salimiyah, dan pengelolaan pesantren diserahkan kepada KH Najib Salimi, putra dari Pesantren Mlangi (Kurniawan, 2020). Artinya, kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan pesantren sangat tinggi, dengan dibuktikan adanya sumber dana yang mengalir dari luar. Baik dengan akad wakaf ataupun akad hibah.

Kedua akad ini berbeda, dan penting untuk dibedakan. Akad wakaf, merupakan pemberian yang berupa harta ataupun asset yang tidak boleh berkurang nilainya. Sedangkan hibah, merupakan pemberian langsung, tidak terikat dan tanpa mempersyaratkan ketentuan sebagaimana wakaf. Hibah juga memberikan porsi sumberdana yang relative besar terhadap pesantren (Basarudin, 2021).

Hibah kepada pesantren juga biasa diberikan, biasanya dilakukan oleh seseorang yang terikat secara emosional dengan pesantren. Baik diberikan kepada kiai (bisarah), juga diberikan kepada lembaganya. Pemberian ini biasanya dilakukan oleh alumni yang sudah di luar pesantren, tetapi masih memiliki keterikatan batin dengan pesantren (Alantaqi, 2013). Alumni pesantren berbeda dengan alumni lembaga pendidikan konvensional. Kedudukan mereka terhadap kiai dan ustadz, berbeda antara murid dan guru. Kedudukan santri dan kiai, akan terus

dipertahankan walaupun santri tidak lagi belajar di pondok pesantren. Ketika mereka menjadi orang yang secara finansial mencukupi, maka mereka akan menjadikan dirinya sebagai salah satu donator pesantren.

c. Kerjasama Pesantren dengan Pemerintah

Sebenarnya sudah banyak kerjasama yang dilakukan Pesantren dengan Pemerintah. Baik lewat Departemen Agama, Departemen Pendidikan, Departemen Keuangan, bahkan Departemen Pertanian. Sudah sejak lama, bahkan sejak Era Pemerintahan Soeharto, menjadikan pesantren sebagai salah satu basis pemberdayaan ekonominya. Berbagai pelatihan telah dilakukan, dengan melibatkan berbagai elemen.

Kementerian Keuangan sendiri sudah mengalokasikan anggaran antara Rp. 2,38 Triliun hingga 2,6 Triliun untuk Pesantren, Madrasah hingga lembaga Pendidikan al Qur'an, di tengah pandemic Covid-19, sasarannya ke 21 ribu pesantren (Yaqin, 2020). Untuk Alokasi ke Pesantren di tahun 2018, Sri Mulyani menyatakan telah menyalurkan 50 Triliun pada lembaga pendidikan pesantren (Kemenkeu, 2018). Tidak hanya lewat Departemen Agama, melainkan juga dari Departemen lainnya. Misalnya dari departemen Tenaga kerja, pemerintah pernah menyalurkan dana 1 Triliun untuk pembentukan 1.000 BLK di pesantren (CNN Indonesia, 2019). Sehingga, rata-rata pembentukan satu BLK sebesar 1 Miliar per pesantren. Jumlah alokasi Triliunan merupakan jumlah yang besar. Dapat dibayangkan bahwa Pemerintahan Kota atau Kabupaten, hanya mendapatkan porsi antara 1,5 sampai 2 Triliun per tahun.

Jejak bantuan Pemerintah ke dunia Pesantren juga sangat besar di tahun-tahun sebelumnya. pada tahun 2013, Kementerian agama juga mengalokasikan beberapa triliun untuk gaji guru pesantren (DetikFinance, 2019). Belum beberapa kerjasama yang tidak menggunakan embel-embel "Pesantren". Seperti Program LM3 di bawah Departemen Pertanian, dengan memberdayakan usaha agrobisnis yang dikelola oleh pesantren. Program ini melibatkan ribuan pesantren penerima dana LM3. Dana tersebut bukan dana kredit yang dikembalikan ke Negara, melainkan sebagai modal yang bersifat hibah.

Banyak bantuan yang diberikan oleh Negara kepada Pesantren. Sehingga, timbul sebuah

anggapan bahwa pesantren selama ini tidak mandiri, karena mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah. Belum program yang akan dicanangkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, akan menambah 'daftar' bantuan Negara kepada pesantren. Walaupun dapat dipahami, bahwa bantuan pemerintah terhadap pesantren adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap lembaga pendidikan keislaman.

Pesantren sendiri merupakan suatu lembaga yang sudah mandiri. Terlepas dari ribuan pesantren yang memiliki fasilitas yang kurang memadai. Tetapi hal ini relative, karena yang dinamakan 'kemandirian', merupakan suatu keadaan dimana seseorang dapat berjalan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Seorang yang berjalan dengan mobil, tidak dapat dikatakan lebih mandiri dibandingkan dengan orang yang berjalan dengan sepeda. Dan, orang yang bersepeda, diberi 'traktiran' atau diberikan 'berbagai perkakas' untuk mendesain sepedanya, tidak berarti bahwa orang yang bersepeda 'tidak mandiri'. Inilah gambaran tentang Kemandirian Pesantren, di tengah gambaran kesederhanaan, dan bantuan dari pemerintah yang banyak diterima oleh lembaga pesantren.

#### 4. KESIMPULAN

Pesantren sudah berdiri dan mandiri sejak awal mula berdirinya. Karena pada fase pertumbuhannya, ia merupakan lembaga yang hadir secara alamiah di tengah masyarakat. Kemandirian masyarakat dan budaya keagamaan yang ada, menumbuhkan tradisi pesantren. Pada tahap perkembangan awal pesantren pada zaman dahulu, pembiayaan awal pesantren dibiayai oleh kiai pendiri itu sendiri atau dengan bantuan masyarakat sekitar. Kemudian, dalam tipe pesantren yang mengadakan jenjang sekolah madrasah dan formal, pembiayaan sekolah/madrasah didapatkan dari para siswa/santri yang bersekolah di madrasah yang didirikan oleh pesantren tersebut. Biaya operasional dalam pondok, juga diambilkan dari uang syahriyah santri berdasarkan keperluan, dan atas otonomi pesantren tersebut. Selain itu terdapat sumber pemasukan bagi pesantren. Segala pemasukan itu bersumber dari kekayaan pesantren itu sendiri, bukan dari luar. Tetapi dalam perkembangannya, pemerintah banyak melakukan kerjasama dengan pesantren, pejabat mengunjungi pesantren, serta alokasi berbagai departemen yang ada di

pemerintahan dalam hal pengadaan program pemberdayaan di Pesantren. Baik dalam bentuk program deradikalisasi, program penguatan modal, bantuan kemandirian ekonomi, dan sebagainya.

## 5. REFERENSI

- Abidin, Z. (2020). Lanskap Peradaban Kajen, *Kanjengan*, 1.
- Alantaqi, W. (2013). *Jangan Marah, Tersenyumlah, Agar Engkau Meraih Surga*. Pustaka Pessantren.
- Basarudin. (2021). *Dinamika Pemikiran Pendidikan Najmudin Makmun di Pesantren Darul Muhajirin Praya*. Bintang Pustaka Madani.
- Bruinessen, M. V. V. (1994). *NU, Tradisi, Relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*. LKiS.
- CNN Indonesia. (2019, February 20). Pemerintah Gelontorkan Rp1 T Bangun 1.000 BLK di Pesantren. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190220135745-92371075/pemerintah-gelontorkan-rp1-t-bangun-1000-blk-di-pesantren>
- DetikFinance. (2019, July 29). Ini yang Membuat Anggaran Kementerian Agama Tembus Rp 38 Triliun. *Detik Finance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1977673/ini-yang-membuat-anggaran-kementerian-agama-tembus-rp-38-triliun>
- Gischa, S. (2020, March 2). Pengertian Kemandirian, Tahap Perkembangannya, dan Faktornya. *KOMPAS*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/02/190000869/pengertian-kemandirian-tahap-perkembangannya-dan-faktornya?page=all>
- Kemenkeu. (2018, Mei). Pemerintah Alokasikan Dana Pendidikan Lebih Dari Rp60 Triliun untuk Madrasah dan Pesantren. *Kementerian Keuangan*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-alokasikan-dana-pendidikan-lebih-dari-rp60-triliun-untuk-madrasah-dan-pesantren/>
- Kurniawan, A. S. A. S. (2020, Oktober). Resensi Buku: *Langgam Kerinduan Untuk Kiai Najib Mlangi*. *MUI Provinsi Lampung*. <http://mui-lampung.or.id/2020/10/15/resensi-buku-langgam-kerinduan-untuk-kiai-najib-mlangi/>
- Kusdiana, A. (2014). *Pondok Pesantren: Jejak, Penyebaran, Jaringan di Wilayah Priangan (1800-1945)*. Humaniora.
- Nazar, S. (2020). *Gugusan ide Pendidikan Islam KH Hasyim, Asy'ari*. Adab.
- Permana, F. E. (2021, Desember). Menag Ingin BUMN jadi Bapak Angkat Kemandirian Pesantren, *Republika*. <https://republika.co.id/berita/r47f26366/menag-ingin-bumn-jadi-bapak-angkat-kemandirian-pesantren>
- Qomar, M. (2000). *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi, Menuju Demokratisasi Institusi*. Erlangga, Erlangga,.
- Solikhin. (2011). *Kontribusi pondok pesantren dalam Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun di Pesantren Al Huda, Boyolali*. PAI STAIN Salatiga.
- Syafei, I. I. (2017). *Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*. *Tadzkiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8.
- Tamami, W. (2018). *BUMP. Majalah Akdun PP Ta'miril Islam*, 1(1).
- Ushuluddin, W. (2002). *Sintesis Pendidikan Asia Afrika Prespektif Pemikiran Pembaharuan Pendidikan Menurut K.H. Zarkasyi-Gontor*. Paradigma.
- Yaqin, M. A. (2020, Oktober). 7 Program Bantuan Pemerintah untuk Pesantren. *Tagar ID*. <https://www.tagar.id/7-program-bantuan-pemerintah-untuk-pesantren>.
- Yunus, M. (2015). *Manajemen Pesantren dan Pembentukan Perilaku Santri*. *Al Riwayah: Jurnal Pendidikan*, 1(1).